

Journal of Government Insight

ISSN: 2789-7418 (online)

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik dan Humaniora
Universitas Muhammadiyah Sinjai.



The Effectiveness of the National Unity and Politics Agency of Karawang Regency in Fostering Community Organizations

Efektivitas Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan

Febri Nur Setiawati¹, Rachmat Ramdani², Lolita Deby Mahedra Putri³

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Corresponding Author: febrinurrsetiawati@gmail.com

Article Info

Abstract

Received:

24/07/2024

Revised:

14/02/2025

Accepted

18/04/2025

Keywords:

Community Organizations; Social Conflict; Organizational Effectiveness; Conflict Management;

Kata Kunci:

Organisasi Kemasyarakatan, Konflik Sosial, Efektivitas Organisasi, Manajemen Konflik,

Abstract: Community organizations are organizations founded by the community voluntarily with certain goals that are social, religious, cultural or common interests. Community organizations have an important role as a forum for community aspirations, social services, and strengthening involvement in the world of politics to build the nation. Conflicts that occur between social organizations can cause divisions between organizations in the future. This research aims to solve a problem that will be researched, therefore researchers in this research use descriptive methods with a qualitative approach. This research uses the theory of Organizational Effectiveness according to Duncan in Richard M. Steers (2003) with indicators of goal achievement, integration and adaptation. The results of this research are that conflicts that occur in Karawang Regency can cause divisions between organizations. suggests that the National Unity and Politics Agency prioritize training activities to avoid conflicts between organizations in the future. Training and coaching provided to organizational representatives in conflict management. Evaluation of the extent to which these skill improvements contribute to reduced conflict as well as increased collaboration between organizations could be a major focus in future studies.

Abstrak:

Organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang didirikan oleh masyarakat secara sukarela dengan tujuan tertentu yang bersifat sosial, agama, budaya maupun kepentingan bersama. Organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat, pelayanan sosial, serta memperkuat keterlibatan dalam dunia politik untuk membangun bangsa. Konflik yang terjadi antar organisasi kemasyarakatan, dapat menimbulkan perpecahan antar organisasi di masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan diteliti, maka dari itu peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Efektivitas Organisasi menurut Duncan dalam Richard M. Steers (2003) dengan indikator pencapaian tujuan, ntegrasi dan adaptasi. Hasil penelitian ini konflik yang terjadi di Kabupaten Karawang dapat menimbulkan perpecahan antar organisasi. Sebaiknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih mengutamakan kegiatan pembinaan untuk dapat menghindari adanya konflik antar organisasi di kemudian hari. Pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada perwakilan ormas dalam manajemen konflik. Evaluasi terhadap sejauh mana peningkatan keterampilan ini berkontribusi terhadap pengurangan konflik serta peningkatan kolaborasi antar ormas dapat menjadi fokus utama dalam studi mendatang.



PENDAHULUAN (INTRODUCTION)

Pembentukan organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Indonesia didasarkan pada prinsip kesukarelaan masyarakat dengan tujuan sosial, budaya, agama, maupun kepentingan kolektif (Hadiwinata, 2003). Keberadaan Ormas memiliki fungsi strategis sebagai sarana penyaluran aspirasi, pemberi layanan sosial, serta wahana partisipasi politik dalam mendukung pembangunan nasional (Wangge, 2017). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 menegaskan bahwa Ormas berperan dalam memperkuat partisipasi masyarakat guna mewujudkan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam tata kelola pemerintahan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) memegang mandat penting untuk melakukan pengawasan, pembinaan, dan pemberian legalitas terhadap Ormas (Rahman et al., 2023). Fungsi tersebut diarahkan untuk memastikan stabilitas sosial, menjaga ketertiban umum, sekaligus menjamin peran Ormas tetap sejalan dengan tujuan pembangunan dan konsolidasi demokrasi tanpa mengganggu ketertiban umum. (Antlöv, 2021; Aspinall, 2013).

Berdasarkan data BAKESBANGPOL hingga saat ini tercatat terdapat sekitar 420 Ormas di Kabupaten Karawang. Secara umum, Ormas berperan dalam menjalankan berbagai aktivitas positif yang bermanfaat bagi masyarakat, baik dalam bidang sosial, kebudayaan, maupun kemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan dinamika yang menunjukkan adanya perilaku sebagian anggota Ormas yang belum sepenuhnya mencerminkan tanggung jawab sebagai organisasi sosial kemasyarakatan.

Pada Januari 2024, misalnya, terjadi peristiwa konflik antar Ormas di Kecamatan Purwasari, yang melibatkan Ormas Pemuda Pancasila dan Ormas Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB). Konflik yang dipicu oleh perebutan lahan sub-material proyek tersebut berujung pada bentrokan fisik dan menyebabkan beberapa anggota mengalami luka ringan akibat penggunaan senjata tumpul, senjata tajam, dan lemparan batu. Kasus ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan adanya potensi penyimpangan peran Ormas dari fungsi idealnya sebagai penggerak partisipasi masyarakat.

Menyikapi kondisi tersebut, BAKESBANGPOL Kabupaten Karawang bersama pemerintah daerah menegaskan pentingnya upaya penguatan pembinaan dan pemberdayaan Ormas. Langkah ini diharapkan mampu mengarahkan Ormas agar senantiasa menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuan dan fungsinya, yaitu menjaga stabilitas sosial, memperkuat persatuan, serta mendukung nilai-nilai kebangsaan. Dengan adanya program pembinaan yang berkelanjutan, Ormas diharapkan dapat lebih berkontribusi positif bagi pembangunan daerah dan terciptanya ketertiban masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA (LITERATURE REVIEW)

Efektivitas organisasi dipahami sebagai tingkat pencapaian tujuan yang ditetapkan secara optimal, dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien (Litterer & Etzioni, 1964). Dalam konteks lembaga pemerintah, efektivitas juga mencakup kemampuan institusi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika sosial serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Steers, 1985). Oleh karena itu, efektivitas Bakesbangpol dapat diukur melalui sejauh mana lembaga ini mampu menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian Ormas sesuai mandat hukum.

Ormas sebagai bagian dari civil society memiliki peran fundamental dalam memperkuat demokrasi dan partisipasi politik warga negara (Hadiwinata, 2003). Fungsi utama Ormas tidak hanya sebagai penyalur aspirasi, melainkan juga sebagai agen kontrol sosial dan penggerak pembangunan (Aspinall, 2013). Namun, literatur menunjukkan bahwa Ormas juga rentan terjebak dalam praktik kekerasan,

kepentingan politik praktis, maupun perebutan sumber daya ekonomi, yang dapat menyimpang dari fungsi idealnya (Antlöv, 2021). Hal ini menegaskan pentingnya pembinaan kelembagaan yang konsisten dari pemerintah.

Landasan yuridis pembinaan Ormas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, yang menegaskan kewajiban Ormas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional dan menjaga ketertiban umum. Regulasi ini memperkuat posisi pemerintah melalui Bakesbangpol untuk melakukan registrasi, pengawasan, serta pembinaan organisasi (Rahman et al., 2023). Literatur hukum menekankan bahwa regulasi tersebut bukan semata-mata sebagai instrumen kontrol, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan Ormas tetap berada dalam koridor demokrasi dan kepentingan publik (Mietzner, 2018).

Bakesbangpol di tingkat daerah bertindak sebagai ujung tombak pemerintah dalam menjaga stabilitas politik, mengelola konflik sosial, serta membina organisasi masyarakat. Menurut teori governance, keberhasilan lembaga ini ditentukan oleh kapasitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, dan efektivitas kebijakan yang dijalankan (Grindle, 2007). Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa Bakesbangpol tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga fasilitator dialog antar-Ormas untuk mencegah konflik dan memperkuat kohesi sosial (Prasetyoningsih, 2020).

Literatur mengenai dinamika Ormas di Indonesia menggarisbawahi adanya kesenjangan antara peran normatif dan praktik di lapangan. Kasus konflik antar-Ormas di berbagai daerah, termasuk Karawang, mencerminkan lemahnya internalisasi nilai kebangsaan serta kurangnya pengawasan intensif (Ufen, 2021). Dalam perspektif manajemen konflik, efektivitas pembinaan Bakesbangpol hanya dapat tercapai jika pembinaan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga mencakup pemberdayaan, edukasi politik, dan peningkatan kapasitas Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan (Fisher, 2000).

METODOLOGI (METHODOLOGY)

Metode penelitian adalah hal yang harus digunakan disetiap penelitian, untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan diteliti, maka dari itu peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian ini menggunakan metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan memberikan gambaran mengenai peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang terhadap efektivitas organisasi kegiatan pembinaan. Lokasi penelitian difokuskan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang, di Jl. A. Yani No. 33 Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat. Pada hari Selasa (04/06/2024). Metode penelitian yang disusun oleh peneliti dengan menggunakan berbagai cara dalam mencari sumber data, yaitu menggunakan sumber data primer maupun sekunder. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan sesi wawancara, observasi serta dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik analisis data dengan cara mereduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan dari data yang telah peneliti amati di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSION)

Efektivitas Organisasi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Karawang Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan sebagai berikut:

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan dengan menciptakan tujuan secara jelas dan terukur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan untuk organisasi kemasyarakatan. Tujuan yang ingin dicapai Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang adalah untuk “meningkatkan partisipasi dalam kehidupan demokrasi di Kabupaten Karawang. Program kegiatan pembinaan untuk organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Karawang berada pada Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 80 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas,

fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang memberikan panduan terkait struktur organisasi dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang.

Pencapaian tujuan program pembinaan peneliti mendapatkan data dan berdasarkan hasil observasi di lapangan kurang tujuan yang dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang masih kurang efektif. Karena berdasarkan data yang diperoleh berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026 mempunyai target 100% yang harus dicapai setiap tahunnya dengan jumlah 14 peserta organisasi kemasyarakatan. Namun dengan data yang peroleh peneliti berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lakip) tahun 2023 target yang dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang hanya 91,47% dengan jumlah peserta organisasi kemasyarakatan sebanyak 12 peserta. Dengan hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (Lakip) yang tidak memenuhi target capaian 100% Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang perlu melakukan evaluasi kembali di kemudian hari untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pada kegiatan pembinaan untuk organisasi kemasyarakatan menjelaskan beberapa adanya program kegiatan pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dirancang dengan baik, mencakup pelatihan, materi terkait organisasi kemasyarakatan, dan sosialisasi yang relevan untuk organisasi kemasyarakatan agar termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembinaan. Terkait pembinaan ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang masih belum efektif dalam melakukan kegiatan pembinaan untuk organisasi kemasyarakatan di tahun 2023

Integrasi

Integrasi yang menekankan pentingnya komunikasi efektif mekanisme yang baik untuk memastikan bahwa semua bagian organisasi untuk saling mendukung. Inetgrasi dalam kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan merupakan program tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang. Pembinaan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk memperkuat kapasitas organisasi, meningkatkan kualitas anggota, serta mendorong partisipasi organisasi kemasyarakatan untuk dapat aktif dalam pembangunan masyarakat. Melalui kegiatan pembinaan yang efektif, organisasi kemasyarakatan dapat membuat perubahan dengan memberikan nilai-nilai kebersamaan antar organisasi, toleransi, serta kerja sama antar organisasi kemasyarakatan. Integrasi sosial dan kemampuan peserta dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan yang berjalan efektif. Namun dalam kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan yang kurang terkontrol dapat memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan pemerintah. Salah satunya dampak negatif yang terjadi adalah terjadinya bentrok antar organisasi kemasyarakatan yang berbeda kepentingan dapat menimbulkan ketidakamanan di tengah masyarakat. Konflik bentrok seringkali berujung pada kerusakan fasilitas umum, korban luka, bahkan korban jiwa, menjadi beban bagi aparat keamanan dan layanan kesehatan.

Dari hasil observasi dilapangan oleh peneliti program pembinaan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang, masih belum efektif bagi organisasi kemasyarakatan karena setelah pelaksanaan program pembinaan yang dilaksanakan hanya satu kali dalam setahun masih terjadinya bentrokan antar organisasi. Sebaiknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang melakukan program pembinaan secara rutin 2-3 kali dalam setahun dengan evaluasi yang terus berjalan kepada anggota organisasi kemasyarakatan untuk meminimalisir aksi bentrok di kemudian hari. Dalam menyikapi permasalahan konflik antar organisasi kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik hanya melakukan proses mediasi kepada anggota yang melakukan konflik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik harus melakukan kembali dalam kegiatan

pembinaan untuk organisasi kemasyarakatan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Adaptasi

Adaptasi dalam kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan mengacu pada proses penyesuaian pendekatan yang dilakukan untuk memastikan organisasi kemasyarakatan dapat efektif dalam menghadapi perubahan situasi sosial, dan politik. Adaptasi dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan memungkinkan bagi untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang terus berfungsi secara optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan masyarakat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga perlu mempertimbangkan pelatihan bagi perwakilan ormas dalam manajemen konflik dan teknik negosiasi, sehingga mereka dapat lebih efektif dalam menangani perbedaan pendapat secara konstruktif. Dengan demikian, adaptasi ini tidak hanya memperkuat pembinaan ormas sebagai instrumen pembangunan masyarakat, tetapi juga mengurangi potensi konflik yang dapat merugikan stabilitas dan harmoni sosial di tingkat lokal.

Adaptasi menyesuaikan dengan pendekatan untuk mengatasi konflik yang mungkin timbul, dalam mengelola bentrok secara efektif dengan melakukan pembinaan rutin untuk organisasi kemasyarakatan harus melibatkan pemahaman dengan materi yang mendalam tentang akar dari penyebab konflik. Dengan beradaptasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memastikan bahwa kegiatan pembinaan tidak hanya relevan dan efektif, tetapi juga mampu dalam meningkatkan kapasitas organisasi kemasyarakatan untuk menjalankan perannya dilingkungan masyarakat

Adaptasi dalam kegiatan pembinaan ormas yang diselenggarakan setiap tahun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sambil mengelola potensi konflik bentrok antar ormas, memerlukan pendekatan yang holistik dan berbasis kerjasama. Pertama-tama, Kesbangpol perlu memfasilitasi dialog terbuka antara semua pihak terlibat sebelum acara untuk memahami perbedaan pendapat dan kekhawatiran masing-masing ormas. Ini dapat mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman bersama tentang tujuan dan manfaat dari kegiatan pembinaan. Selain itu, penting untuk mengimplementasikan mekanisme penyelesaian konflik yang jelas dan transparan, seperti prosedur mediasi atau negosiasi yang dipimpin secara netral. Dengan membangun fondasi komunikasi yang kuat dan melengkapi perwakilan ormas dengan keterampilan manajemen konflik yang baik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat meminimalkan risiko terjadinya bentrokan fisik dan menjaga fokus acara pada tujuan pembinaan ormas yang konstruktif.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat mempertimbangkan untuk mengintegrasikan kegiatan kolaboratif antar ormas dalam agenda pembinaan, seperti proyek bersama atau diskusi panel, yang dapat membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling mendukung di antara mereka. Dengan pendekatan ini, kegiatan pembinaan ormas yang diselenggarakan secara tahunan dapat menjadi ajang yang tidak hanya memperkuat kapasitas dan koordinasi ormas, tetapi juga mempromosikan perdamaian dan stabilitas organisasi. Dalam kegiatan pembinaan untuk organisasi kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang dituntut untuk memberikan mengembangkan pendekatan yang lebih responsif dan relevan terhadap dinamika sosial yang ada. Dengan melakukan analisis untuk memenuhi dan memahami karakteristik kebutuhan, tantangan dan kebutuhan spesifik organisasi kemasyarakatan.

KESIMPULAN (CONCLUSION)

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap Efektivitas Kegiatan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Karawang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan organisasi kemasyarakatan masih belum sepenuhnya efektif. Hal ini tercermin dari capaian target kegiatan pembinaan

yang hanya mencapai 91,47% atau melibatkan 12 dari 14 organisasi kemasyarakatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021–2026.

Dari aspek integrasi, efektivitas kegiatan pembinaan masih terbatas karena rendahnya frekuensi pelaksanaan, yakni hanya 2–3 kali per tahun. Kondisi ini menyebabkan dampak pembinaan kurang signifikan terhadap peningkatan kapasitas organisasi, penyelesaian konflik internal, maupun penguatan jejaring antarormas. Pembinaan yang bersifat berkelanjutan dan adaptif terhadap kebutuhan spesifik masing-masing organisasi diperlukan untuk memperkuat kepercayaan, kapasitas manajerial, serta kolaborasi antarlembaga.

Sementara itu, dari aspek adaptasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu mengembangkan pendekatan yang lebih terstruktur, proaktif, dan inklusif dalam menghadapi dinamika konflik antarormas. Strategi pembinaan harus disertai dengan mekanisme komunikasi yang terbuka dan transparan guna mendorong penyelesaian perbedaan secara damai serta mencegah munculnya potensi konflik fisik.

Dengan demikian, efektivitas pembinaan organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Karawang akan meningkat apabila diarahkan pada penguatan kapasitas, sinergi, dan budaya dialog antarormas secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Adisasmita, R. (2015). *Pembangunan Pedesaan dan Perdesaan*. Graha Ilmu.
- Antlöv, H. (2021). Last Democracy Standing? Civil Society and Politics in Indonesia. *The Swedish Institute of International Affairs*.
- Apriliani, R., Nurhayati, N., & Purnama, D. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kuningan. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(2), 172–189.
- Arifin, R. (2020). Implementasi Sistem Informasi Manajemen dalam Pengelolaan BUMDes. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 10(2), 115–128.
- Aspinall, E. (2013). A Nation in Fragments: Patronage and Neoliberalism in Contemporary Indonesia. *Critical Asian Studies*, 45(1), 27–54.
<https://doi.org/10.1080/14672715.2013.758820>
- DetikJabar. (2024). 2 Ormas Terlibat Bentrok di Karawang, 3 Orang Terluka. Karawang. Diambil kembali dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7131175/2-ormas-terlibat-bentrok-di-karawang-3-orang-terluka>
- Eko, S., Fauzi, M., & Ritonga, M. (2015). *Desa Membangun Indonesia*. Seknas FITRA.
- Hadiwinata, B. S. (2003). The Politics of Civil Society in the Post-Suharto Indonesia: NGOs and CSOs Relations. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(1), 39–54.
- Hasanah, Andriyani, L., Purnamasari, O., Hakim, L., Izzatusholekhah, KN, M. J., Patrianti, T., & SUmarni, L. (2022). *Manajemen BUMDes Untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat*.
- Lakip . (2023). Dalam *Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang*
- Litterer, J. A., & Etzioni, A. (1964). A Comparative Analysis of Complex Organizations: On Power, Involvement, and Their Correlates. *American Sociological Review*.
<https://doi.org/10.2307/2091214>
- Metra, P. (2023). Analisis Manajemen Dana Desa Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

Lolo Kecil. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 4(2), 107-118.
<https://doi.org/10.32939/fdh.v4i2.2902>

Maulana, M. D. (2022). Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pekanbaru Dalam Pembinaan Dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan Di Kota Pekanbaru. 9

Purnamasari, D., & Ma' ruf, A. (2020). Model Pemberdayaan BUMDes Berbasis Tetrapreneur. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 21(1), 37-50.

Rahman, A., Wasistiono, S., Riyani, O., & Tahir, I. (2023). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1461.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v7i2.1492>

Renstra. (2021). Dalam *Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karawang Tahun 2021-2026*.

Riyanti, A., & Adinugraha, H. H. (2021). Efektivitas Unit Usaha Sewa Alat Konstruksi pada BUMDes Singajaya. *Jurnal Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 70-83.

Rhamadan , D. R. (2022). Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Organisasi Masyarakat di Kabupaten Karawang. 6. Diambil kembali dari <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>

Samadi, Rahman, A., & Afrizal. (2019). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam peningkatan ekonomi masyarakat (Studi Pada Bumdes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal*, 2(1), 1-19.

Suryana, D. (2020). Analisis Tata Kelola Keuangan BUMDes. *Jurnal Ekonomi Desa*, 4(1), 22-31.

Suwondo, A. (2019). *Manajemen BUMDes: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Deepublish.

Steers, R. M. (2003). *Organization Effectiveness, A Behavioral View* Good Year Publishing Company.

Syahyuti. (2015). *Pembangunan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan*. IPB Press.

Wangge, H. Y. R. (2017). Civil-military relations during transition and post-democratisation periods: A view from Southeast Asia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 36(2), 137-148. <https://doi.org/10.1177/186810341703600205>